

VISI, MISI DAN AGENDA AKSI

**AHMAD ALI-ABDUL KARIM ALDJUFRI
(BERAMAL)**

**CALON GUBERNUR-CALON WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERIODE 2025-2029**

SELASA, 27 AGUSTUS 2024

1.1.Latar Belakang

Sulawesi Tengah, merupakan provinsi yang memiliki luas wilayah terluas di Pulau Sulawesi. Terletak di bagian tengah Pulau Sulawesi dengan Kota Palu sebagai ibukota provinsi. Provinsi Sulteng ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah yang diubah lagi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022. Usia Provinsi Sulawesi Tengah pada 13 April 2024 mencapai 60 tahun. Pembangunan di provinsi ini terbilang cukup pesat dalam satu dekade terakhir. Namun perkembangan pembangunan di wilayah ini sempat terhenti akibat adanya runtutan bencana yang menimpa. Tepatnya pada tanggal 28 September 2018, Provinsi Sulawesi Tengah mengalami bencana dahsyat yakni gempa berkekuatan 7,4 SR yang diiringi pula bencana tsunami dan likuifaksi. Kemudian setahun berselang dari bencana gempa, virus Covid-19 di awal Tahun 2020 juga turut mewabah di wilayah Sulteng dan mempengaruhi perekonomian dan pembangunan di provinsi ini yang dampaknya cukup besar dirasakan bagi masyarakat di Sulteng.

Dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang baik, daerah harus memetakan terlebih dahulu berbagai tantangan yang dihadapi baik dari sisi ekonomi, sosial-kependudukan, serta tantangan wilayahnya. Dengan demikian, intervensi kebijakan fiskal melalui program prioritas dapat secara langsung menjawab tantangan daerah yang dihadapi.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Periode 2025-2045 mempunyai Visi **“Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”**. Visi ini secara singkat disebutkan pula sebagai **Visi Indonesia Emas 2045**, serta menjadi rujukan regulasi bagi perumusan Visi dan Misi pembangunan di daerah dan pembangunan daerah periode 2025-205 bagi pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan pembangunan tahunan daerah. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulteng Periode 2025-2045 mempunyai Visi: **“Sulawesi Tengah Sebagai Wilayah Pertanian dan Industri Berbasis Sumberdaya Alam Yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”**. Visi ini bermakna Provinsi Sulawesi Tengah merupakan satu dari 38 provinsi di Indonesia yang mempunyai ciri khas sebagai daerah yang struktur penduduknya dan struktur perekonomiannya berada di perdesaan yang bermata pencaharian bertani, berkebun dan nelayan. Visi ini akan menjadi acuan dalam setiap konstetasi politik di daerah selama dua puluh tahun ke depan.

Kedua acuan Pembangunan Daerah tersebut menjadi rujukan **Ahmad Ali-Abdul Karim Aldjufri (AA-AKA)** merumuskan Visi, Misi dan Agenda Aksi kami dalam Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Periode 2025-2029 sebagai berikut:

“Sulawesi Tengah Sejahtera Bersama, Maju dan Berkelanjutan”

Makna “Provinsi Sulawesi Tengah Yang Sejahtera Bersama” yakni Provinsi Sulawesi Tengah yang berhasil meningkatkan kemampuan perekonomian daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi berkeadilan (economic for equity of growth), yang bermuara pada pendapatan dan kesejahteraan masyarakat yang tinggi. Perekonomian ditunjang oleh sektor ekonomi unggulan daerah yang menjadi mesin pertumbuhan (engine of growth) ekonomi yang tinggi inklusif.

“Sulawesi Tengah Yang Maju” bermakna pula bahwa Provinsi Sulawesi Tengah berusaha mencapai tingkat pembangunan daerah yang maju dan berhasil dalam pemerataan pembangunan antar wilayah, peningkatan pelayanan publik yang inovatif yang didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana (infrastruktur) serta sumberdaya manusia yang Berdaya Saing, serta Tangguh terhadap bencana.

Makna “Sulawesi Tengah Yang Berkelanjutan” yaitu Provinsi Sulawesi Tengah sebagai daerah yang terus maju dan modern dalam melaksanakan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam (SDA) untuk meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat.

Semua makna di atas dapat tercapai dan terwujud apabila kita saling bekerjasama dalam bingkai “Gotong-Royong Membangun Sulawesi Tengah Yang Sejahtera Bersama, Maju, dan Berkelanjutan”.

Tabel 1.1. Sasaran Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

No.	Sasaran MakroKesra	Target dan Realisasi Tahun					
		Real 2021	Real 2022	2023R/T	2024RT	2025T	2026T
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi/LPE (%)	11,70	15,17	11,91 (6,56)*	10,49^b (10,80)*	7,92	8,77
2.	Inflasi (%)	2,2	5,96	2,97 (1,91)*	2,82^a (2,18)*	2,71	2,58
3.	IPM (Poin)	69,79	71,01	71,66 (69,87)*	70,00	70,26	70,39
4.	Kemiskinan (%)	13,71	12,30	12,41 (8,39)*	11,77^d (7,65)*	6,85	5,92
5.	Pengangguran (%)	3,75	3,00	2,95 (3,00)*	3,15^c (2,54)*	2,08	1,47
6.	Rasio Gini (Poin)	0,326	0,305	0,304 (0,22)*	0,301^d (0,19)*	0,18	0,16
7.	NTP (Poin)	103,51	101,17	106,33 (103,58)*	124,57^a (105,58)*	107,58	109,58
8.	NTN (Poin)	104,56	105,7	94,70 (109,20)*	94,79^a (109,41)*	109,63	109,85
9.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	68,73	69,99	69,85 (73,87)*	68,53^c (74,79)	76,78	78,37

Sumber: BPS Sulteng dan Lampiran Perda Nomor 13 Tahun 2021 Tentang RPJMD Sulteng Tahun 2021-2026 (data diolah); Angka dalam kurung bertanda asterisk merupakan target (T), realisasi (R), dan warna merah realisasi belum tercapai; ^adata NTP dan NTN Juni 2024; ^bdata LPE triwulan I 2024; ^cdata Februari 2024; ^ddata Maret 2024.

Di Tahun 2023, terdapat empat indikator kinerja pembangunan yang realisasinya melampaui target yakni LPE mencapai 11,91 persen melampaui target sebesar 6,56 persen, IPM mencapai

71,66 poin melampaui target 69,87 poin. Selanjutnya, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 2,95 persen pada Agustus 2023 berada di bawah target penurunan TPT dalam RPJMD Sulteng Tahun 2021-2026 yakni sebesar 3 persen, serta Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 106,33 poin melampaui target sebesar 103,58 poin. Sebaliknya, lima indikator ekonomi makro lainnya tidak tercapai yang berada di bawah target. Kelima indikator tersebut adalah Tingkat Inflasi mencapai 2,97 persen berada di atas target yakni 1,91 persen, Persentase penduduk miskin meningkat dari 12,30 persen pada 2022 menjadi 12,41 persen pada 2023 dan 11,77 persen pada 2024. Distribusi Pendapatan yang ditunjukkan oleh Koefisien Gini mencapai 0,304 poin berada di atas target sebesar 0,22 poin pada 2023 dan 0,301 poin pada Maret 2024 walaupun belum mencapai target penurunan Koefisien Gini sebesar 0,19 poin. Selanjutnya Nilai Tukar Nelayan (NTN) berada di bawah target yakni hanya mencapai 94,70 poin yang berarti nelayan belum sejahtera karena NTN belum berada di atas 100 poin dari target mencapai 109,20 poin pada 2023 dan 94,79 poin pada 2024 juga di bawah target penurunan 109,41 poin. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) hanya mencapai 69,85 persen dari target 73,87 persen. Hal ini berarti setiap 100 orang pekerja menanggung 69,85 orang atau 70 orang yang belum bekerja dan tidak bekerja. Data ini bermakna bahwa permasalahan pembangunan di Sulawesi Tengah meliputi Stabilitas Harga kebutuhan pokok yang ditunjukkan oleh Angka Inflasi, Tingkat Kemiskinan, Distribusi Pendapatan semakin timpang, Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan semakin besar beban yang ditanggung pekerja yang tercermin dari TPAK.

Di Tahun 2024, terdapat tujuh dari Sembilan indikator yang belum mencapai target dalam RPJMD periode 2021-2026. Ketujuh indikator ekonomi makro adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) mencapai 10,49 persen di bawah target LPE dalam RPJMD Sulteng yakni 10,80 persen. Tingkat inflasi mencapai 2,82 persen pada Juni 2024 berada di atas target inflasi Tahun 2024 mencapai 2,18 persen. Tingkat kemiskinan mencapai 11,77 persen berada di atas target tingkat kemiskinan dalam RPJMD Sulteng sebesar 7,65 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 3,15 persen pada Februari 2024 berada di atas target TPT Tahun 2024 mencapai 2,54 persen. Capaian indeks Gini sebagai ukuran distribusi pendapatan sebesar 0,301 poin belum mencapai target Tahun 2024 sebesar 0,19 poin. Nilai Tukar Petani (NTP) pada Juni 2024 melampaui target NTP Tahun 2024 mencapai 124,57 poin yang targetnya sebesar 105,58 poin. Nilai Tukar Nelayan (NTN) mencapai 94,79 poin pada Juni 2024, jauh berada di bawah target Tahun 2024 sebesar 109,41 poin. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Februari 2024 mencapai 68,53 persen jauh di bawah target Tahun 2024 sebesar 74,79 persen.

1.2. Sasaran Pembangunan

Periode RPJMD Keempat Tahun 2021-2026 atau periode terakhir dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Periode 2005-2025 di Provinsi Sulteng menunjukkan capaian dan proyeksi indikator kinerja pembangunan provinsi Sulteng atau indikator kinerja visi Pemerintah Provinsi Sulteng periode 2021-2024. Selama periode 2021-2023, IPM Sulteng untuk pertama kali mencapai kategori dari sedang menjadi “tinggi”, meningkat dari 69,79 poin pada 2021 menjadi 70,28 poin pada 2022 atau terjadi peningkatan 0,7 persen. Capaian tersebut melampaui target IPM dalam RPJMD Provinsi Sulteng Tahun 2021-2026 masing-masing 69,68 poin pada 2021 dan 69,64 poin pada 2022. IPM Sulteng tersebut berada di bawah IPM Kota Palu pada dua tahun yakni 2021 dan 2022, demikian pula Tahun 2023 yakni 71,66 poin berada di atas target periode RPJMD Keempat 2021-2026 yakni 69,87 poin. Angka kemiskinan menurun dari 13 persen pada 2021 menjadi 12,30 persen Tahun 2022, namun kembali meningkat menjadi 12,41 persen di Tahun 2023 dan 11,77 persen di Tahun 2024. Angka kemiskinan di Tahun 2023 dan 2024 masih di atas target tahun tersebut yakni 10,84 persen dan 7,65 persen. TPT mencapai 3,75 persen pada 2021 menurun menjadi 3 persen pada 2022, lalu meningkat lagi menjadi 3,49 persen pada rilis data Februari 2023. TPT pada Februari 2023, berada di atas target tingkat pengangguran terbuka di Tahun tersebut mencapai 2,84 persen, lalu menurun menjadi 2,95 persen pada Agustus 2023, selanjutnya meningkat lagi menjadi 3,15 persen pada Februari 2024 belum mencapai target 2,54 persen. Hal ini berkontribusi negatif pada kinerja perekonomian makro Sulteng. Laju pertumbuhan ekonomi Sulteng berada di bawah target LPE Tahun 2024. PDRB perkapita ADHB Provinsi Sulteng berada di atas PDRB perkapita Kota Palu karena didukung oleh sumbangan tiga daerah yakni Kabupaten Banggai, Morowali dan Morowali Utara. Ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Sulteng yang ditunjukkan oleh Koefisien Gini menurun dari 0,326 poin pada 2021 menjadi 0,305 poin pada 2022 dan 0,304 poin pada 2023, serta 0,301 poin pada 2024 masih berada di atas target distribusi pendapatan Provinsi Sulteng dalam RPJMD Keempat yakni 0,24 poin pada 2022 dan 0,22 poin pada 2023, serta 0,19 poin pada 2024.

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa dari lima indikator Visi Pemerintah Provinsi Sulteng Tahun 2021-2026, di Tahun 2023, hanya IPM, Tingkat Pengangguran terbuka (TPT), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan Produk Domestik Regional Bruto Perkapita yang melampaui target. Sebaliknya, Persentase Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan tidak mencapai target dan melebar. Target penurunan persentase penduduk miskin dalam RPJMD Sulteng Periode 2021-2026 mencapai 10,84 persen. Namun, justru terjadi kenaikan dari 12,30 persen pada 2022 menjadi 12,41 persen pada Maret 2023. Distribusi pendapatan walaupun menurun 0,01 poin, tetapi tidak mencapai target. Hal ini bermakna ada 1 persen penduduk Sulteng yang menguasai 30,4 persen kekayaan Sulteng.

**Tabel 1.2 Capaian dan Proyeksi Kinerja Indikator Ekonomi Makro Provinsi Sulteng
Tahun 2021-2026**

No.	Indikator Kinerja Makro	Satuan	RPJMD IV Tahun 2021-2026						Status
			2021	2022	2023	2024*	2025*	2026*	
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	69,79 (69,68)*	70,28 (69,64)*	71,66 (69,87)*	70	70,26	70,39	Terlampau 2022-2024
2	Angka Kemiskinan	%	13,00	12,30	12,41 (10,84)*	11,77 (9,65)*	8,69	7,90	Tidak Tercapai 2022-2024
3	Angka Pengangguran	%	3,75	3,00	2,95 (2,84)*	3,15 (2,54)*	2,08	1,47	Menurun, tetapi target belum Tercapai 2022-2024
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	11,70	15,17	11,91 (10,36)*	10,49 (10,80)	11,02	11,05	Tetap tinggi, tetapi target tidak tercapai 2022-2024
5	PDRB Perkapita ADHB	(Juta Rupiah)	82,02 (81,84)**	106,07 (105,54)**	112,46 (70,20)*	73,79	77,89	82,50	Terlampau 2022-2023
6	Ketimpangan Pendapatan	Poin	0,326	0,305 (0,24)*	0,304 (0,22)*	0,301 (0,19)	0,18	0,32	Tidak mencapai target 2022-2024

*Diisi dengan target Indikator Kinerja Makro pada RPJMD Tahun 2021-2026; a data TPT Agustus 2023, data Kemiskinan Maret 2023, data LPE Triwulan IV 2023; Data dalam kurung bersumber dari IKU dalam Bab VIII RPJMD Provinsi Sulteng Tahun 2021-2026; ** Sulteng Dalam Angka Tahun 2023

Sumber: BPS Tahun 2023, data diolah

Di Tahun 2024, empat indikator tidak tercapai targetnya dalam RPJMD yakni Angka Kemiskinan mencapai 11,77 persen masih di atas target Tahun 2024 dalam RPJMD periode 2021-2026 yakni 9,65 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang ditargetkan menurun dari target 2,54 persen pada 2024, ternyata justru meningkat dari 2,95 persen pada 2023 menjadi 3,15 persen pada 2024. Laju pertumbuhan ekonomi ditargetkan meningkat dari 10,80 persen dalam RPJMD, tetapi capaiannya di bawah target yakni mencapai 10,49 persen. Hal ini berarti bahwa sektor industri pengolahan yang menjadi penopang ekonomi Sulteng telah berada dalam *steady-state* atau puncak pertumbuhan ekonomi karena hilirisasi industri logam dasar dan rantai pasok industri telah berada pada kondisi normal. Kondisi ini tidak mengubah kontribusi ekonomi Sulteng dalam perekonomian nasional hanya mencapai 1,64 persen dan dalam perekonomian Sulawesi mencapai 23,87 persen. Target penurunan

ketimpangan distribusi pendapatan juga belum tercapai yakni 0,19 poin pada 2024. Namun, realisasinya hanya mencapai 0,301 poin. Hal ini berarti ada 1 persen penduduk Sulteng atau sekitar 3.000 orang menguasai 30,1 persen kekayaan Sulteng.

1.2.1. Capaian Dan Proyeksi Kinerja Kualitas Sumberdaya Manusia di Sulteng Tahun 2021-2026

Capaian dan Proyeksi Kinerja Kualitas Sumberdaya Manusia di Provinsi Sulteng dan Nasional tercermin pada tabel 1.3. Data periode 2022-2023 merupakan data riil, maupun perbandingan data target dan realisasi. Sedangkan data periode 2024-2026 merupakan data yang berasal dari RPJMN periode 2020-2024. Selama Tahun 2022-2023, Usia Harapan Hidup (UHH) meningkat dari 68,93 tahun menjadi 70,66 tahun atau terjadi peningkatan sebesar 2,51 persen.

Tabel 1.3 Usia Harapan Hidup (UHH) Provinsi Sulteng dan Nasional pada Tahun 2021-2026

No	UHH	Satuan	Tahun 2021-2026						Pertumbuhan 2022-2023 (%)
			2021	2022	2023*	2024*	2025*	2026*	
4	Sulteng	Tahun	68,83	68,93 (72,0)*	70,66 (73,30)*	74,70	75,30	76	2,51
5	Indonesia	Tahun	71,57	71,85	72,13	na	na	na	0,39

*Data Proyeksi dalam Bab VIII RPJMD Sulteng Tahun 2021-2026, target dalam RPJMD belum tercapai
Sumber: BPS Tahun 2023, data diolah dan RPJMD Sulteng

Capaian UHH pada 2023 di Provinsi Sulteng berada di bawah target RPJMD yakni 73,30 tahun. Namun, laju kenaikan UHH Provinsi Sulteng lebih tinggi dari laju UHH Nasional yakni mencapai 0,39 persen. Laju kenaikan UHH Sulteng ini akan lebih tinggi lagi bila sektor hulu kesehatan dan di sektor hilir dilakukan sinkronisasi berbasis pada pola asuh dimulai dari perlakuan atas perempuan, infrastruktur kesehatan, peningkatan sumberdaya tenaga kesehatan, perluasan dan peningkatan mutu derajat kesehatan termasuk pemberian jaminan kesehatan termasuk pemberian bantuan iuran (PBI) dan pelibatan pemangku kepentingan kolaboratif.

Tabel 1.4. Rata-Rata Sekolah (RLS) Provinsi Sulteng dan Nasional pada Tahun 2021-2026

No.	RLS	Satuan	Tahun 2021-2026						Pertumbuhan 2022-2023 (%)
			2021	2022	2023	2024*	2025*	2026*	
1.	Sulteng	Tahun	8,89	8,89 (10,35)*	8,96 (11,12)*	12,21	12,98	14,85	0,79
2.	Indonesia	Tahun	8,54	8,69	9,06	9,18	na	na	4,25

*Data dalam Bab VIII RPJMD Provinsi Sulteng Tahun 2021-2026 dan BPS Tahun 2023, **target dalam RPJMD belum tercapai**

Sumber: BPS Tahun 2023, data diolah dan RPJMD Provinsi Sulteng Tahun 2021-2026

Tabel 1.4 menampilkan data Rata-rata lama sekolah (RLS) Sulteng dan Nasional. Hal menarik, RLS Provinsi Sulteng selama periode 2021-2022 stagnan pada **8,89** tahun. Data tersebut menunjukkan bahwa selama Tahun 2022-2023, target RLS belum tercapai. Ada permasalahan Pendidikan di Sulteng berdasarkan data ini. Permasalahan tersebut baik berupa angka melanjutkan, angka putus sekolah, *span of control* dan *span of management* yang terpisah kewenangan antara Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah seperti terjadi di Kabupaten Morowali sejak migrasi penduduk Kabupaten Buol sebanyak hampir 5000 jiwa, belum diikuti oleh penyediaan fasilitas Pendidikan yang mencukupi dan memadai bagi siswa SMA/SMK yang mengikuti kepindahan orang tuanya ke kawasan industri berbasis logam dasar. Akibatnya kegiatan belajar-mengajar dilakukan secara bergantian di selasar ataupun teras kelas. Laju pertumbuhan RLS Provinsi Sulawesi Tengah lebih rendah dari laju pertumbuhan RLS Indonesia masing-masing 0,79 persen dan 4,25 persen atau laju kenaikan RLS nasional mencapai 5,38 kali lipat.

Tabel 1.5 Harapan Rata-Rata Sekolah (HLS) Provinsi Sulteng dan Nasional pada Tahun 2021-2026

No.	HLS	Satuan	2021	2022	2023	2024*	2025*	2026*	Pertumbuhan 2022-2023 (%)
1.	Sulteng	Tahun	13,23	13,32 (14,08)*	13,33 (14,38)*	14,68	14,98	15,28	0,08
2.	Indonesia	Tahun	13,08	13,1	13,15	13,89	na	Na	0,38

*Data dalam Bab VIII RPJMD Tahun 2021-2026, **target dalam RPJMD belum tercapai**

Sumber: BPS Tahun 2023, data diolah dan RPJMD masing-masing Provinsi Sulteng dan nasional

Tabel 1.5 menunjukkan Provinsi Sulteng dan nasional. HLS Sulteng bila merujuk pada RPJMD Provinsi Sulteng Tahun 2021-2026 ternyata realisasinya belum mencapai target. Laju pertumbuhan HLS nasional Tahun 2022-2023 lebih tinggi ketimbang laju pertumbuhan HLS Provinsi Sulawesi Tengah.

1.2.2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) dibentuk oleh komponen pembentuk indeks yaitu Rata rata lama sekolah laki-laki dan perempuan, usia harapan hidup laki-laki dan perempuan serta paritas daya beli (PPP) masyarakat laki-laki dan perempuan. Nilai IPG di Provinsi Sulawesi Tengah, Capaian IPG turun sebesar 0,1 atau pada nilai 98,09 point di Tahun 2022.

Analisis keterkaitan dengan indikator makro ekonomi, peningkatan IPG, angka harapan hidup, lama sekolah, dan pengeluaran perkapita yang disesuaikan menunjukkan adanya progres dalam pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah. Indikator-indikator ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan PDRB. Penyediaan akses pendidikan yang lebih baik, peningkatan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi perempuan dapat menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan pembangunan ekonomi secara keseluruhan.

Tabel 1.6. Indeks Pembangunan Gender Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2021-2026

No.	Uraian	Satuan	Tahun						Pertumbuhan 2022-2023 (%)
			2021	2022	2023*	2024*	2025*	2026*	
1	Provinsi Sulawesi Tengah	Poin	91,91	92,24 (91,90)*	91,93	91,96	92	92,03	0,36
2	Indonesia	Poin	91,27	91,63	91,34	91,39	na	na	0,39

Sumber: BPS Tahun 2023, data diolah; na, data belum tersedia; periode 2023-2026 bersumber dari RPJMD/RPJMN, target dalam RPJMD terlampaui

Data publikasi IPG Sulteng rilis sampai dengan Tahun 2022. Selama Tahun 2021-2022, laju pertumbuhan IPG Sulteng mencapai 0,36 persen lebih rendah ketimbang laju pertumbuhan IPG Indonesia yang mencapai 0,39 persen. Di Tahun 2022, IPG Sulteng melampaui target IPG dalam RPJMD.

1) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IDG digunakan untuk mengukur partisipasi aktif perempuan di bidang ekonomi, politik dan manajerial. Tiga indikator yang digunakan yaitu persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, keterlibatan perempuan di parlemen, dan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajerial, professional, administrasi, dan teknis.

Tabel 1.7. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2021-2026 (poin)

No.	Uraian	Satuan	Tahun						Pertumbuhan Tahun 2022- 2023 (%)
			2021	2022	2023*	2024*	2025*	2026*	
1	Provinsi Sulawesi Tengah	Poin	75,8	77,52	76	78	80	82	2,27
2	Indonesia	Poin	76,26	76,59	73,97	74,18	na	na	0,43

Sumber: BPS Tahun 2023, data diolah; na, data belum tersedia; 2023-2026 bersumber dari RPJM/D.

Tabel 1.7 menunjukkan bahwa di Tahun 2022, IDG Sulteng lebih tinggi dari IDG nasional masing-masing mencapai 77,52 poin dan 76,59 poin. Laju kenaikan IDG Sulteng selama periode 2021-2022 mencapai 2,27 persen lebih tinggi dari laju kenaikan IDG Indonesia yang hanya mencapai 0,43 persen.

Tabel 1.8. Sumbangan Pendapatan Perempuan Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2021-2026

No.	Uraian	Satuan	Tahun						Pertumbuhan Tahun 2021-2022 (%)
			2021	2022	2023*	2024*	2025*	2026*	
1	Provinsi Sulawesi Tengah	Persen	31,06	31,11	na	na	na	na	0,16
2	Indonesia	Persen	37,22	37,11	na	na	na	na	0,3

Sumber: BPS Tahun 2023, data diolah, data diolah; na, data belum tersedia.

Tabel 1.8 menunjukkan bahwa sumbangan pendapatan perempuan Sulteng berada di bawah proporsi pendapatan perempuan nasional. Demikian pula laju kenaikan proporsi pendapatan perempuan di Sulteng lebih rendah pula ketimbang laju kenaikan proporsi pendapatan perempuan nasional.

Tabel 1.9. Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (PPP) Provinsi Sulteng dan Nasional Tahun 2021-2026

No.	PPP	Satuan	2021	2022	2023*	2024*	2025*	2026*	Pertumbuhan Tahun 2021-2022 (%)
1	Sulteng	Rpribu/Org/Thn	9378	9696	11660	12100	12550	12990	3,39
2	Indonesia	Rpribu/Org/Thn	11156	11479	na	na	na	na	2,90

Sumber: BPS Tahun 2023, data diolah; Tahun 2023-2026 merujuk pada RPJMD Tahun 2021-2026

Tabel 1.9 menunjukkan bahwa Pengeluaran Perkapita Disesuaikan atau *Purchasing Power Parity* (PPP) menunjukkan bahwa PPP nasional lebih tinggi 1,18 kali lipat dari PPP Sulteng. Sebaliknya, laju kenaikan PPP Sulteng selama periode 2021-2022 mencapai 3,39 persen lebih tinggi ketimbang kenaikan PPP nasional yang hanya mencapai 2,9 persen. Hal ini bermakna, daya beli penduduk Sulteng secara keseluruhan, lebih cepat tergerus ketimbang daya beli penduduk Indonesia oleh kenaikan harga-harga kebutuhan pokok dan atraktivitas Kawasan industri Kabupaten Morowali, Morowali Utara dan Banggai yang menimbulkan ketimpangan pembangunan yang ditunjukkan oleh angka Indeks Williamson yang naik dari **1,36** poin pada 2021 menjadi **1,52** poin pada 2022. Kerentanan sosial ekonomi dapat menjadi

tantangan daerah ini di masa dating, di luar ancaman degradasi lingkungan yang mulai terasa di tengah silaunya logam dasar nikel.

1.3. Tantangan Daerah

1.3.1. Tantangan Ekonomi Daerah

Kinerja pembangunan ekonomi Provinsi Sulteng terus menunjukkan prestasi yang cukup luar biasa, melampaui rata-rata nasional. Pertumbuhan ekonomi di Sulteng berdasarkan jenis lapangan usaha memang lebih banyak dipengaruhi oleh Sektor Pertanian dan Kehutanan, Industri Pengolahan, dan Sektor Pertambangan dan Penggalian. Laju pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan dan Pertambangan dalam 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Namun sebaliknya, kontribusi Sektor Pertanian terhadap perekonomian yang merupakan sektor strategis terus mengalami penurunan. Dilihat dari klasifikasi jenis pengeluaran, Sektor PMTB/Investasi dan Ekspor memegang peranan yang cukup besar. Sektor-sektor di atas berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang cukup kuat, mengingat wilayah Sulteng memiliki komoditas sumber daya alam (SDA) yang melimpah dan banyak dilirik oleh para investor untuk mendirikan pabrik pengolahan. Hal ini sebenarnya menyimpan masalah kerentanan pada kelembagaan sosial ekonomi yang berujung pada *immiserizing growth* atau pertumbuhan membenamkan sebagai ciri khas daerah-daerah pertambangan yang menerima kutukan sumberdaya, di luar ancaman runtuhnya pranata sosial dan degradasi lingkungan berkelanjutan.

1.3.2. Tantangan Sosial Kependudukan

Sumber Daya Manusia (SDM), dalam hal ini adalah penduduk, memegang peranan penting dalam proses pembangunan suatu wilayah. Selain sebagai pelaku dalam pembangunan, penduduk juga sebagai tujuan akhir dari suatu pembangunan. Oleh sebab itu, penataan dan pengembangan yang berkaitan erat dengan penduduk harus direncanakan dengan matang. Dalam proses perencanaan pembangunan, data dan informasi kependudukan menjadi satu dari beberapa faktor yang sangat dibutuhkan. Perkembangan penduduk perlu dicermati, baik dari sisi jumlah maupun karakteristik penduduk, seperti komposisi dan distribusinya. Setiap kebijakan yang diambil dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat seharusnya mempertimbangkan karakteristik masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan data Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2023, jumlah penduduk di Sulawesi Tengah pada Tahun 2021 sebanyak 3,022,88 juta jiwa lalu meningkat menjadi 3.066,14 juta jiwa pada 2022 atau bertambah sebanyak 44.260 jiwa, mengalami peningkatan

sebesar 1,43 persen. Selama Tahun 2021-2022, laju pertumbuhan penduduk tertinggi dicapai oleh Kabupaten Morowali mencapai 5,03 persen, diikuti oleh Kabupaten Sigi sebesar 2,03 persen dan Kabupaten Tojo Una-Una mencapai 1,96 persen. Kabupaten Morowali menerima migrasi penduduk baik dari daerah lain di Sulteng seperti berasal dari Kabupaten Buol sekitar 5 ribu jiwa maupun asal daerah lain di luar Provinsi Sulteng. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, kepadatan penduduk juga mengalami peningkatan. Kondisi ini tidak terlepas dari mobilitas penduduk dari daerah perdesaan ke daerah perkotaan secara cukup masif akibat bertambahnya jumlah pusat pertumbuhan ekonomi di Sulteng. Hal ini ditunjukkan oleh data BPS dalam Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2023 yakni selama Tahun 2020-2022, hanya Kabupaten Banggai Laut yang mempunyai Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) menurun dari 1,20 persen pada Tahun 2010-2020, menurun menjadi 0,74 persen pada Tahun 2020-2022. Sebaliknya, LPP semua daerah lainnya mengalami peningkatan dari periode 2010-2020 ke periode 2020-2022 yang secara keseluruhan ditunjukkan oleh LPP Sulteng naik dari 1,22 persen menjadi 1,53 persen. Upaya pengendalian jumlah penduduk gencar dilakukan baik oleh BKKBN Provinsi Sulteng maupun Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Provinsi Sulteng dan 13 kabupaten/kota. Kolaborasi dan sinergi antar kedua instansi vertikal dan daerah membutuhkan peningkatan. Pada Tahun 2021, persentase penduduk perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah kawin di Sulawesi Tengah, 52,19 persen di antaranya sedang menggunakan KB dan masih terdapat 33,95 persen yang tidak ikut program KB.

Pada ketiga daerah yang LPP tiga tertinggi, jumlah penduduk miskin berturut-turut mencapai 15,50 ribu jiwa, 31,47 ribu jiwa dan 26,51 ribu jiwa atau proporsinya mencapai 18,57 persen dari jumlah penduduk miskin Sulteng di Tahun 2023 yang mencapai 395,66 ribu jiwa. Pemerintah daerah di ketiga kabupaten perlu memprioritaskan penanganan kedua tantangan yakni laju kenaikan LPP lebih tinggi pada periode 2020-2022 ketimbang 2010-2020 dan 73,48 ribu jiwa penduduk miskin berada di daerah ini. Kebijakan yang lebih terarah dalam penyelenggaraan kesehatan, pendidikan, kualitas dan jaminan tenaga kerja, dan sarana pendukung lainnya dalam mencapai kesejahteraan setiap warganya.

Tabel 1.10. Kondisi Demografi di Sulteng

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk 2021 (Jiwa)	Laju pertumbuhan 2020-2022 (%)	Sebaran Penduduk 2022 (%)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²) 2022	Rasio Jenis Kelamin 2022 (%)	TPT 2023 (%)	IPM 2023 (Poin)
Banggai Kepulauan	123,56	1,62	4,03	52	102,42	1,56	67,05
Banggai	370,97	1,36	12,10	45	103,83	3,12	72,19
Morowali	176,24	5,03	5,75	39	122,15	2,84	73,82
Poso	252,65	1,80	8,24	33	106,49	1,67	73,25

Donggala	305,89	1,03	9,98	60	105,71	2,79	68,17
Toli-toli	228,64	0,88	7,46	62	103,91	3,12	69,68
Buol	148,25	1,17	4,83	40	105,05	3,14	70,18
Parigi Moutong	446,71	0,87	14,57	77	104,89	2,11	69,06
Tojo Una-Una	169,48	1,96	5,53	30	105,22	2,83	68,47
Sigi	266,81	2,03	8,70	51	105,33	2,60	70,28
Banggai Laut	71,35	0,74	2,33	104	101,59	3,64	69,12
Morowali Utara	124,01	1,51	4,04	14	108,26	2,23	70,74
Palu	381,57	1,27	12,44	1071	100,28	5,65	83,71
Sulteng	3.066,14	1,53	100	50	105,22	2,95	71,66

Sumber: BPS, Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2023, (data diolah)

Seiring dengan peningkatan LPP di Provinsi Sulawesi Tengah dari 1,22 persen pada Tahun 2010-2020 menjadi 1,53 persen hanya pada Tahun 2020-2022, kepadatan penduduk juga mengalami peningkatan menjadi 50 jiwa/km² pada 2022, atau meningkat dari 48,28 jiwa/km² pada 2021. Wilayah Kota Palu menjadi wilayah terpadat di antara wilayah lainnya di Sulteng mencapai 1.071 jiwa/km² pada 2022, naik dari 945 jiwa/km² di Tahun 2021. Hal ini karena Kota Palu sebagai Ibukota Provinsi menjadi hub atau pusat ekonomi bagi daerah-daerah di Sulteng karena daya Tarik Kota Palu dan daya tolak daerah asal. Kepadatan penduduk yang berlebihan akan dihadapkan pada masalah-masalah sosial ekonomi, seperti masalah keterbatasan lahan pemukiman, penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan penyediaan lapangan pekerjaan. Kepadatan penduduk yang tinggi akan berimbas pada tingkat pengangguran yang tinggi apabila lapangan pekerjaan tidak dapat menampung angkatan kerja yang ada seperti yang tercemin dari angka Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) di Kota Palu mencapai 5,65 persen tertinggi di Sulteng bahkan di atas TPT Sulteng yang mencapai 2,95 persen di Tahun 2023.

Jika dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin, penduduk di Sulawesi Tengah di Tahun 2022, lebih banyak berjenis kelamin laki-laki, yaitu sebanyak 1,57 juta jiwa (51,27 persen). Sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1,49 juta jiwa (48,73 persen). Rasio penduduk laki-laki terhadap perempuan di Tahun 2022 sebesar 105,22 poin menurun dari 105,49 poin di Tahun 2021, yang berarti setiap 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 105 – 106 penduduk laki-laki. Komposisi penduduk menurut umur ini bermanfaat untuk mengetahui distribusi penduduk usia muda (0-14 tahun) berjumlah 815.830 jiwa atau proporsinya mencapai 26,61 persen, usia produktif (15-64 tahun) berjumlah 2.085.277 jiwa atau proporsinya mencapai 68,01 persen, dan lansia (65 tahun ke atas) berjumlah 165.036 jiwa atau proporsinya mencapai 5,38 persen. Pertumbuhan penduduk tinggi yang disumbang oleh penambahan jumlah penduduk usia muda yang belum produktif dapat menjadi beban perekonomian secara makro dan menjadi beban rumah tangga secara mikro.

Adanya distribusi penduduk di atas menunjukkan dasar bagi Pemerintah Provinsi Sulteng

dan 13 kabupaten/kota bagaimana memanfaatkan bonus demografi. Hal ini dapat terlihat dan tergambarkan melalui Angka Beban Ketergantungan (Dependency Ratio). Pada Tahun 2021, angka beban ketergantungan Sulawesi Tengah sebesar 47,11 poin. Artinya, setiap 100 orang penduduk usia produktif memiliki tanggungan sebanyak 47-48 orang yang belum produktif atau dianggap tidak produktif lagi. Angka beban ketergantungan di bawah 50 merupakan indikasi bahwa suatu daerah berada pada periode jendela peluang (windows of opportunity). Kesempatan ini sebagai dampak positif adanya bonus demografi (demographic dividend), yaitu bonus yang dinikmati suatu wilayah sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk produktif (rentang usia 15-64 tahun). Suatu wilayah dikatakan mengalami bonus demografi jika dua orang penduduk usia produktif (15-64) menanggung satu orang tidak produktif (kurang dari 15 tahun dan lebih dari 65 tahun). Keuntungan bonus demografi dari sisi perekonomian tentu akan membuka peluang peningkatan perekonomian melalui peningkatan pendapatan, sehingga Sulteng memiliki kesempatan besar dalam memanfaatkan bonus demografi tersebut. Dukungan dan kebijakan yang tepat di bidang Pendidikan dan kesehatan dari pemerintah daerah di Sulteng diperlukan untuk membentuk generasi muda yang cerdas, produktif dan terampil yang berkontribusi bagi kemajuan daerah dan bangsa kedepannya.

Komposisi penduduk Sulteng berdasarkan usia menunjukkan bahwa, pertama, kategori Post-Generation-Z atau mereka yang berusia kurang dari 9 tahun sebanyak 512.740 jiwa. Kedua, Generation-Z yakni mereka yang berusia 10-24 tahun berjumlah 779.580 jiwa. Ketiga, Generasi Milenial yakni mereka yang berusia 25-39 tahun berjumlah 787.020 jiwa. Keempat, Generation-X yakni mereka yang berusia 40-59 tahun berjumlah 959.080 jiwa. Kelima, generasi Baby-Boomer yakni mereka berusia 60-74 tahun berjumlah 488.450 jiwa. Keenam, Pre-Boomer yakni mereka berusia lebih dari 75 tahun berjumlah 160.850 tahun.

1.3.3. Tantangan Geografi

Sulawesi Tengah terletak antara 2°22' Lintang Utara dan 30°48' Lintang Selatan dan antara 119°22'–124°22' Bujur Timur dan dilalui oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa. Berdasarkan posisi geografisnya, Provinsi Sulawesi Tengah memiliki batas-batas: Utara-Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo; Selatan-Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Sulawesi Selatan; Barat-Selat Makassar; Timur-Provinsi Maluku Utara. Sebagai provinsi terluas di Pulau Sulawesi dengan luas sekitar 35 persen (61.841,29 Km²) dari luas Pulau Sulawesi. Luas wilayah laut Sulteng mencapai 189.480 Km² dengan jumlah pulau sebanyak 1.604 pulau dan panjang garis pantai 6.653,31 Km. Provinsi Sulteng memiliki 12 kabupaten dan 1 kota, yang meliputi 175 kecamatan, 175 kelurahan dan 1.842 desa. Kabupaten Morowali Utara dan Banggai

merupakan wilayah kabupaten yang memiliki wilayah terluas dengan tingkat kepadatan penduduk terendah di antara kabupaten/kota lainnya. Sementara itu, konsentrasi kepadatan penduduk masih berada di Kota Palu yang merupakan ibukota provinsi. Hampir semua bagian provinsi ini bergunung-gunung (kira-kira 42,80 persen di atas ketinggian 500 Meter Dari Permukaan Laut-MDPL) dan puncak tertinggi adalah Gunung Nokilalaki yang mencapai 2.610 MDPL. Selain gunung, Sulawesi Tengah memiliki beberapa sungai di antaranya Sungai Lariang, Sungai Gumbasa, dan Sungai Palu. Di Sulteng, terdapat danau yang menjadi obyek wisata terkenal, yakni Danau Posoda dan Danau Lindu.

Pada sisi letak geografis, dengan disahkannya Undang-Undang Ibu Kota Nusantara (IKN) baru oleh DPR di Kalimantan Timur, Sulteng menjadi wilayah yang strategis sebagai daerah penyangga IKN baru dan sebagai akses masuk bagi agenda prioritas pembangunan kedepan. Pemerintah Provinsi Sulteng memprioritaskan pembangunan proyek infrastruktur strategis dan kebijakan pembangunan terkait untuk menunjang pengembangan wilayah penyangga IKN. Sumbangan ekonomi pulau Jawa pada ekonomi Nasional mencapai 58,59 persen, artinya hampir tiga perempat ekonomi nasional disumbangkan oleh Pulau Jawa. Sebaliknya, sumbangan Sumatra mencapai 21,66 persen, Kalimantan dan Sulawesi masing-masing mencapai 8,22 persen dan 6,11 persen. Pada sisi lain, sumbangan Bali-Nusa Tenggara dan Papua masing-masing mencapai 3,11 persen dan 2,43 persen. Artinya, pada sisi skala ekonomi, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Papua belum mencapai titik optimal produksi untuk kebutuhan ekonomi Indonesia yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung air, pangan, jasa lingkungan. Kontribusi ekonomi dalam perekonomian nasional regional Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) saja telah mencapai 20,85 persen. Hal ini hampir setara dengan kontribusi ekonomi Pulau Sumatra, atau hampir setara dengan gabungan Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali-Nusa Tenggara. Inilah menjadi satu dari beberapa alasan dari eksistensi UU IKN. Infrastruktur pendukung diperlukan untuk kelancaran mobilitas dan pergerakan ekonomi yang akan masuk atau keluar dari dan ke IKN melalui Sulteng. Provinsi Sulteng termasuk daerah yang dilewati oleh garis Khatulistiwa yang melintasi semenanjung bagian utara yang menyebabkan iklim di daerah ini tropis.

Secara geografis, wilayah Sulteng merupakan jalur patahan dari pertemuan beberapa lempeng, yaitu lempeng Pasifik, Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Dari fenomena ini, wilayah Sulteng rawan akan bencana khususnya pergerakan tanah seperti gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi. Dari data historis Tahun 1927 – 2018, telah terjadi sebanyak 11 kali kejadian gempa di atas 6 SR yang mengguncang Sulteng. Kejadian gempa yang disertai tsunami yang menelan banyak korban jiwa terjadi pada 28 September 2018 dengan korban yang meninggal

dunia sebanyak 2.830 orang, korban hilang 701 jiwa, korban luka 2.537 jiwa dan jumlah pengungsi sebanyak 53.173 kepala keluarga (KK) atau 172.999 jiwa. Tantangan yang masih terjadi dan perlu menjadi prioritas Pemerintah Daerah di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten adalah menyelesaikan pembangunan hunian tetap dan infrastruktur yang rusak masih berjalan pembangunannya.

Tantangan dan dampak kesulitan geografis juga dapat dilihat dari data Indeks Kesulitan Geografis (IKG) yang merupakan ukuran untuk menentukan tipologi desa berdasarkan tingkat kesulitan untuk akses pada suatu desa. Akses yang dimaksud adalah akses terhadap pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, serta aksesibilitas jalan atau sarana transportasi, dan komunikasi. Nilai IKG yang rendah menunjukkan bahwa aksesibilitas di wilayah tersebut baik, dan begitupun sebaliknya. Pada Tahun 2021 IKG Sulteng berkisar antara 12,56 sampai dengan 77,30 dari total 1.842 desa. Jika dikelompokkan, maka sebanyak 12,65 persen desa di Sulteng nilai IKGnya rendah, 58,15 persen cukup rendah, 25,24 persen sedang, dan 3,96 persen tinggi. Mayoritas desa-desa yang memiliki nilai IKG tinggi adalah desa-desa yang ketersediaan fasilitas/infrastrukturnya sangat rendah, baik karena akses jalan yang buruk ataupun letak geografis desa yang berada jauh di pedalaman, ataupun di lereng/puncak gunung. Selain itu, 686 desa dari 1.842 desa atau proporsinya 37,24 persen masih *blank-spot* dengan jumlah terbanyak yakni 126 desa berada di Kabupaten Banggai. Komitmen Pemda Sulteng tidak hanya dapat dilihat pada tataran peraturan perundang-undangan saja, namun pada realisasi anggaran Lingkungan Hidup di Sulteng membuktikan hal sebaliknya. Dilihat dalam data realisasi APBD Sulteng Tahun Anggaran (TA) 2020. Realisasi Anggaran Lingkungan Hidup hanya 10 Miliar atau 0,02 persen dari APBD Sulteng TA 2020 (<https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412>). Tentu anggaran sebesar ini tidak akan cukup melindungi 4,3 juta Ha hutan alam Sulteng.

1.3.4. Tantangan Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pembangunan

Keterlibatan perempuan di parlemen Tahun 2021 dan Tahun 2022 menunjukkan angka yang sama yaitu sebesar 11,43 persen, stagnannya angka ini menunjukkan bahwa ada masalah atau hambatan yang dihadapi. Menurut *United Nations Development Program* (UNDP) yaitu Pertama, Hambatan Langsung, Hambatan Bersifat Mendasar, Hambatan Struktural.

Hambatan langsung meliputi Kurangnya Kepercayaan Perempuan terhadap Sistem Politik, Kurangnya Keterampilan dan Pendidikan Politik, Kurangnya Pengetahuan akan Sistem Politik, Kurangnya Minat Perempuan terhadap Politik, Kurangnya Sumberdaya Finansial, Kurang Percaya Diri, Kurang Mobilitas, Tanggung Jawab keluarga, Kurangnya Perempuan sebagai kader aktif Partai Politik, Kurangnya dukungan dari Partai Politik, serta persepsi yang menganggap politik itu kotor.

Hambatan bersifat mendasar meliputi Budaya Maskulin dan Dominasi Laki-Laki, Agenda Parpol yang berorientasi pada laki-laki, Kurangnya demokrasi di Internal Parpol, Komersialisasi Politik, Sistem Kepemiluan, Nepotisme dan Elitisme dalam Parpol, Kekerasan Politik, Korupsi dalam politik.

Hambatan bersifat struktural meliputi Dikotomi Diskursif Ranah Publik-Privat, Patriarki Publik-Privat, Perilaku Sosial yang Patriarkis terhadap Laki-Laki dan Perempuan, Fundamentalisme Keagamaan.

Strategi yang ditempuh untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 yaitu, **pertama**, strategi mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender. Selain itu, dilakukan pula, pengintegrasian perspektif gender tersebut dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai pemantauan dan evaluasi.

Kedua, strategi Pemberdayaan Perempuan, melalui Upaya pembangunan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kualitas perempuan, yang diwujudkan dalam bentuk, **WID** (women in development) yang terfokus kepada kuantitas perempuan dalam pembangunan; **WAD** (women and development), yang terfokus kepada kualitas peran perempuan dalam proses pembangunan; **GAD** (gender and development) yang terfokus kepada relasi antara laki dan perempuan.

Akhirnya, peningkatan partisipasi perempuan dalam Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 dapat tercipta secara kolaboratif dengan mendorong peningkatan suara perempuan melalui transformasi paradigma pembangunan dari dimensi kompetisi, menjadi dimensi kolaboratif, berperan setara dalam pembangunan.

Adapun **Visi** kami sebagai calon Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2025-2029 adalah “**Sulawesi Tengah Sejahtera Bersama, Maju dan Berkelanjutan**” dengan delapan **Misi** sebagai calon Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2025–2029, sebagai berikut:

Misi 1: Melakukan Transformasi Sumberdaya Manusia yang Inklusif. Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan inklusif melalui berbagai agenda aksi, yaitu **Sulteng Cerdas Beramal bagi 38.531 orang anak tidak sekolah Usia 16-18 tahun terdiri dari 22.402 anak laki-laki dan 16.129 anak perempuan, dan 207.827 orang anak usia 19-24 tahun belum lanjut pendidikan terdiri 112.960 orang anak laki-laki dan 94.867 orang anak perempuan, Sulteng Sehat Beramal bagi 703.788 jiwa penduduk yang belum memiliki Jaminan Kesehatan (BKKBN Sulteng 2021), Sulteng**

Taman Ilmu Beramal (Sulteng SciencePark), Sulteng Inklusi Beramal terdiri dari: Sulteng Hijau Beramal, Rumah Tangga Perempuan Miskin Sulteng-Beramal sejumlah 31.448 RTM (DTKS 2020), Sulteng Difabel Beramal sejumlah 69.632 jiwa (Susenas 2023), Sulteng Antisipatif Penduduk Menua sejumlah 307.133 jiwa.

Misi 2: Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Terdigitalisasi dan Reformasi Birokrasi Tematik dan Berkelanjutan. Misi ini dimaksudkan untuk menciptakan kelembagaan birokrasi yang kuat, efisien, terdigitalisasi, adaptif, inovatif sehingga mampu memberikan pelayanan prima dan berkualitas, menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Peningkatan sumber daya manusia aparatur pemerintah melalui berbagai pendidikan dan pelatihan teknis untuk meningkatkan kompetensi aparatur yang profesional melalui inovasi berbasis Iptek, sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara efisien, efektif dan akuntabel. Agenda Aksi yang akan dijalankan **Sulteng Tangguh Beramal, Sulteng Efisien Beramal, Sulteng Digital Beramal, Sulteng Adaptif Beramal, Sulteng Inovatif Beramal, Sulteng Akuntabel Beramal, Pemerintah Sulteng Hijau Beramal.**

Program Utama yang hendak dijalankan adalah Membangun Aparatur Sipil negara yang profesional, Reformasi Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Akuntabilitas Birokrasi yang bertransformasi dari *Money Follow Function* menjadi *Money Follow Program, Program Follow Result, Result Follow Talent* Reformasi Kelembagaan Birokrasi yang efektif dan efisien, serta Reformasi Pelayanan Publik yang berkualitas melalui digitalisasi dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi secara optimal. Percepatan reformasi birokrasi guna meningkatkan penguatan kelembagaan Pemerintah Daerah, dari Reformasi Birokrasi General menjadi Reformasi Birokrasi Tematik Administrasi Layanan Publik, Reformasi Birokrasi Tematik Kemiskinan, Reformasi Birokrasi Tematik Tengkes, Reformasi Birokrasi Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi, Reformasi Birokrasi Ekonomi Sirkuler Reformasi Birokrasi Pemberian Bantuan Sosial dari Bantuan Sosial yang sifatnya hadiah (charity) kepada Bantuan Sosial Digital dan akses internet pada rumah ibadah sebagai jalan memakmurkan rumah ibadah;

Misi 3: Mewujudkan Transformasi Perekonomian Daerah Yang Inklusif melalui Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penguatan Kelembagaan Ekonomi dan Sosial Yang Terdigital dan Terhubung dengan Akses Pasar. Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan penguatan kelembagaan ekonomi dan sosial, sehingga mampu

menggerakkan perekonomian guna meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat. Misi ini juga dimaksudkan sebagai upaya memastikan kehadiran negara di masyarakat dalam percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) di Provinsi Sulawesi Tengah. Percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrem yang pada Tahun 2024 mencapai 1,27 persen dan kemiskinan keseluruhan mencapai **11,77** persen dengan target kemiskinan ekstrim mencapai angka 0 persen dan kemiskinan keseluruhan mencapai 7,9 persen, menurunkan Rumah Tangga Miskin Perempuan yang mencapai **31.448 RTM** atau 9,71 persen menurut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS 2020) menjadi 5 persen pada 2029, mengentaskan Nelayan sebesar 5,34 persen menjadi 1 persen pada 2029, Mengentaskan Kemiskinan Pemuda, Memberdayakan Difabel saat ini berjumlah 69.632 jiwa atau 2,18 persen sesuai data Survei Sosial Ekonomi Nasional sampai pada 2029. Adapun Tagline Program yang akan dijalankan adalah: **Sulteng Protektif Beramal, Sulteng Berdaya Beramal, SultengPreneur Beramal, Santripreneur Sulteng Beramal, Padat Karya Sulteng Beramal, Perbankan Hijau Sulteng Beramal, Kredit Perbankan Hijau Sulteng Beramal, Teknologi Keuangan Hijau Sulteng Beramal, Sulteng Syariah Beramal, Asuransi Lahan Pertanian Pangan dan Hortikultura Sulteng Beramal seluas 47.485 ha, Asuransi Ternak Sapi Sulteng Beramal sejumlah 461.563 ekor, Asuransi Tani Sulteng Beramal sejumlah 359.962 jiwa dan Asuransi Nelayan Sulteng Beramal sejumlah 37.606 jiwa (BPS Sulteng, 2024), Lumbung Dana Asuransi Bencana Sulteng, Asuransi Padat Karya Kewenangan Provinsi Sulteng Beramal sejumlah 76.080 Rumah Tangga Miskin (RTM) terdiri dari 29.924 RTM desil 1 kategori “Sangat Miskin” dan RTM desil 2 kategori “miskin” berjumlah 46.156 (DTKS 2020) yang bersinergi dengan korporasi dan Badan Pengelolaan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang beroperasi di wilayah Sulteng dan bersinergi pula dengan Dana Desa dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR).**

Misi 4: Mewujudkan Peningkatan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Daerah.

Misi ini dimaksudkan untuk mengembangkan infrastruktur daerah yang berkualitas guna mendukung terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha kreatif, peningkatan aktivitas pengelolaan sumber daya alam berbasis potensi wilayah di berbagai sektor ekonomi terutama usaha kecil menengah, membuka keterisolasian dan meningkatkan konektivitas antar wilayah, khususnya daerah terpencil. Merevitalisasi berbagai sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, irigasi dan sanitasi sebagai daerah yang sewaktu-waktu terancam bencana alam. Percepatan pembangunan infrastruktur guna membuka akses transportasi darat antar daerah dalam provinsi dan antar provinsi, termasuk akses yang

menghubungkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu dengan wilayah-wilayah *hinterland*, serta mewujudkan adanya **Konektivitas Jalan Hijau Beramal, Irigasi Hijau Beramal, Listrik Hijau Beramal, Pengelolaan Pesisir Beramal, Permukiman dan Perumahan Hijau Beramal, Kepulauan dan Daerah Terpencil Hijau Beramal.**

Misi 5: Menjalankan Pembangunan Wilayah Terluar, Terdepan, Terpencil yang Merata dan Berkeadilan. Misi ini untuk mewujudkan terciptanya pemerataan pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah, sebagai jawaban atas kesenjangan antar wilayah Pantai Timur Sulawesi Tengah dan Wilayah Pantai Barat Sulawesi Tengah yang ditunjukkan oleh angka Indeks Williamson mencapai **1,52** poin pada Tahun 2022 yaitu dengan menjalankan program pembangunan berkeadilan, Sinergi Memanfaatkan Dana Kecamatan, Dana Desa, Dana Kelurahan, *Charity, Filantrophy, Corporate Social Responsibility* di kabupaten/kota melalui pembangunan berbasis pegunungan, sungai, danau, pesisir bagi pengurangan kemiskinan dan ketimpangan antar Kecamatan maupun antar Perdesaan, memperkuat kelembagaan ekonomi di perdesaan dan wilayah terpencil termasuk membangun rantai usaha antara Bumdes dengan BUMD dan swasta, serta mengembangkan potensi ekonomi perdesaan bagi pemerataan antar wilayah melalui peningkatan produktivitas dan kapasitas SDM, dan penyediaan Sulteng **Padat Karya Sungai Beramal, Padat Karya Danau Beramal, Padat Karya Pesisir Beramal, Padat Karya Proteksi Pulau Beramal, Padat Karya Proteksi Perubahan Iklim dan Adaptasi Iklim Beramal, Padat Karya Konservasi Flora dan Fauna Beramal** bagi ekowisata guna menurunkan angka pengangguran.

Misi 6: Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup sehingga tercipta suatu kehidupan harmonis dan bahagia, melalui peningkatan kualitas penyediaan air bersih, listrik, perumahan dan penataan lingkungan kumuh. Misi ini akan diwujudkan melalui Program Penataan Ruang Terintegrasi, penataan permukiman dan manajemen pengelolaan sampah, penyediaan ruang terbuka hijau, Mitigasi Perubahan Iklim dan Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Lingkungan Hidup, serta memastikan agar seluruh aktivitas kegiatan masyarakat ramah lingkungan, guna mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) yang enam tahun lagi yakni pada 2030 akan dievaluasi. Adapun Agenda Aksinya adalah **“Sulteng Beramal Berperan Setara Memandukan Kepentingan Memenangkan Kehidupan”**;

Misi 7: Mewujudkan Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Sekawasan Laut Sulawesi-Selat Makassar, Kawasan Pegunungan Tengah Sulawesi, Kawasan Teluk Tolo-Perairan Halmahera. Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan percepatan pembangunan dan

optimalisasi pengelolaan sektor unggulan melalui peningkatan kerja sama pembangunan antar daerah dalam lingkup provinsi maupun dengan daerah di luar provinsi. Misi ini akan dijalankan melalui kerjasama antar daerah utamanya sekawasan Teluk Tolo baik kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah, Sultra, Maluku, Maluku Utara, se Kawasan Laut Sulawesi di Sulawesi Tengah, Sulbar, Gorontalo, Sulut, Kaltara, Kaltim, Kalsel, sekawasan Teluk Tomini dan Perairan Halmahera Bagian Barat terdiri dari Provinsi Sulut, Gorontalo, Sulawesi Tengah dan Maluku Utara sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Antar daerah, Menata Hubungan Antara Provinsi Sulawesi Tengah dengan Pemerintah Pusat yang lebih sinergis, serta Meningkatkan Kapasitas Pemangku Kepentingan di Provinsi Sulawesi Tengah dalam Pelayanan Publik dan peningkatan Inovasi dan Daya Saing Provinsi Sulawesi Tengah. Agenda aksi yang akan dilakukan dalam makna tagline **Sulteng Kolaboratif Beramal**.

Misi 8: Melindungi dan Mengelola Lingkungan Hidup berbasis pada Teknologi Informasi yang Terintegrasi dan dijalankan secara Sistematis dan Digital. Misi ini dimaksudkan untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara terintegrasi secara sistematis dan digital pada semua bidang kepada masyarakat melalui teknologi informasi dan pengembangan sistem terintegrasi dan digitalisasi, melalui instrumen Kerjasama dengan Organisasi Masyarakat Sipil (CSO), Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE), Pengurangan Gas Rumah Kaca, Kurikulum Harmoni Manusia dan Alam. Agenda Aksi dilakukan melalui tageline **Sulteng Konservasi Beramal** melindungi dan mengelola daya dukung dan **Sulteng Harmoni Dalam Keberagaman**.

Secara Singkat, Agenda Aksi kami selaku calon Gubernur Sulteng Periode 2025-2029 mencakup tiga belas agenda aksi **BERAMAL** sesuai tanggal Ulang Tahun Sulteng sebagai berikut:

1. Program BERAMAL Untuk Pendidikan

- ✓ Program ini berupa kegiatan maupun sub kegiatan akan menysasar pada 38.531 anak usia 16-18 Tahun yang belum lanjut kuliah usia 19-24 tahun Jumlah anak yang belum memiliki kesempatan Kuliah 207.827 anak melalui Beasiswa Pendidikan. Rincian bagi Beramal untuk Pendidikan SMA meliputi 38.531 orang X Rp1,8,- juta per tahun selama 3 tahun sebesar **Rp208.067.400.000,-** atau **Rp69.355.800.000,-** per tahun
- ✓ Beasiswa usia 19-24 tahun sebesar 30 persen dari 207.827 orang usia 19-24 X Rp2.000.000,- X 4 Tahun sebesar **Rp374.088.000.000,-** atau **Rp93.522.000.000,-**
- ✓ Pendidikan Vokasi;
- ✓ Sarana dan Prasaran Pendidikan Memadai;

- ✓ Insentif untuk tenaga Kesehatan, Pendidikan, Penyuluh maupun Petugas fungsional Penunjang lainnya di wilayah 3 T dan Perbatasan.

2. Program BERAMAL Untuk Sehat

- ✓ BPJS Kesehatan Gratis 703.788 jiwa X 10 persen X Rp35.000,- untuk kelas 3 X 60 bulan X 5 tahun=70.379 orang x Rp35.000,- X 60 bulan X 5 tahun=Rp738.979.500.000,- atau Rp147.795.900.000,- per tahun;
- ✓ Sarana dan Prasarana Kesehatan yang terstandard;
- ✓ Insentif untuk Tenaga Kesehatan di wilayah khusus;
- ✓ Meningkatkan Standard Rumah Sakit Daerah Kabupaten;
- ✓ Meningkatkan atau Membangun RSUD Pratama di wilayah penyangga RSUD;
- ✓ Mobile Health Service (Pelayanan Kesehatan Bergerak);

3. Program BERAMAL Untuk Kesetaraan dan Keberagaman,

- ✓ Kegiatan Sasaran Perlindungan Sosial Bagi Kelompok Rentan khususnya kelompok disabilitas berjumlah 69.632 Jiwa sesuai data Susenas 2023 (termasuk di dalamnya Miskin Difabel berjumlah 15.790 jiwa (data DTKS 2020) melalui fasilitasi Kredit Usaha Daerah (KURDA) difabel, fasilitasi KUR dan Ultra Mikro (UMi) Difabel, dan penyediaan ruangan ramah difabel bagi aktivitas kelompok difabel berpartisipasi dalam pembangunan;
- ✓ Kegiatan Sasaran Pemberdayaan Kelembagaan Ekonomi Lansia yang beririsan dengan kegiatan Beramal Padat Karya Infrastruktur Kewenangan Provinsi: 307.113 Jiwa ;
- ✓ Kegiatan Sasaran Kepala Rumah Tangga Perempuan 31.448 KK beririsan dengan Beramal Padat Karya Infrastruktur Kewenangan Provinsi;
- ✓ Pemberdayaan Kelompok Rentan;
- ✓ Perlindungan Sosial Bagi Kelompok Rentan;
- ✓ Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial;
- ✓ Perlindungan, Penghormatan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat;
- ✓ Bantuan Rumah Ibadah;
- ✓ Dukungan Bagi Organisasi Keagamaan

4. Program BERAMAL Untuk Pemuda dan Olahraga

- ✓ Kegiatan Membangun Sentra Kreatifitas Pemuda;
- ✓ Kegiatan Membangun Sekolah Sepak Bola dan Pusat Pembinaan Cabang Olahraga;

- ✓ Kegiatan Membangun Stadion Taraf Internasional;
- ✓ Kegiatan Melaksanakan Kompetisi Olahraga Reguler;
- ✓ Kegiatan membangun Sistem Pembinaan Prestasi Yang Sehat dan Kompetitif;
- ✓ Kegiatan Revitalisasi Sekolah Menengah Olahraga (SMANOR) dan PPLP;

5. Program BERAMAL Untuk Seni dan Budaya

- ✓ Menginisiasi Pendirian Institute Kesenian Sulawesi Tengah;
- ✓ Menyediakan ruang ekspresi budaya, Pusat Kesenian dan Budaya dan/atau culture hub/culture pole, Gedung Pertunjukan;
- ✓ Preservasi Budaya dan Penguatan Kearifan Tradisional.

6. Program BERAMAL Untuk Reformasi Birokrasi

- ✓ Melanjutkan Reformasi Birokrasi Tematik dan Tata Kelola Pemerintah terdigital;
- ✓ Bantuan Keuangan Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat desa di 1.842 Desa yang bersinergi dengan Dana Desa;
- ✓ Insentif Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD;
- ✓ Melanjutkan Proses Pemekaran Wilayah Kabupaten – Kota;
- ✓ Menempatkan Pejabat Daerah sesuai Daftar Urutan Kepangkatan (DUK), Kapasitas dan Kompetensi;
- ✓ Mewujudkan Pelayanan Pemerintah, Cepat, Tepat, Efisien berbasis digital

7. Program BERAMAL Untuk Petani, Nelayan dan Pekerja:

- ✓ Asuransi Lahan Pertanian Pangan dan Holtikultura: 47.584 Ha X Rp180.000,- X 20 persen X 3 Kali Musim Tanam-Panen X 5 tahun=Rp25.695.360.000,- atau Rp8.565.120.000,- per tahun (80 persen disubsidi oleh Pemerintah Pusat);
- ✓ Asuransi Ternak Sapi: 461.563 Ekor X Rp175.000,- X 20 persen X 5 Tahun=Rp80.773.525.000,- atau Rp16.154.705.000,- (80 persen disubsidi oleh Pemerintah Pusat);
- ✓ Asuransi Nelayan : 37.606 Jiwa RT Miskin Nelayan : 17.274 RTN (Perikanan Tangkap : 16.670 RTP dan RTN Perikanan Budidaya sebanyak 1714 RTP)= 16.670 KK x Rp38.600,- BPJS TK pada 3 Jaminan (Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Kehilangan Lapangan Kerja) x 12 bulan X 5 tahun=Rp38.607.720.000,- atau Rp7.721.544.000,-
- ✓ Bantuan Pupuk Subsidi Murah dan Terjangkau;
- ✓ Bantuan Bibit Pertanian dan Ternak Gratis;

- ✓ Bantuan Sarana dan prasarana pertanian modern;
- ✓ Perahu dan Alat Tangkap Nelayan;
- ✓ BPJS Gratis untuk Pekerja Informal beririsan dengan Program Beramal untuk Padat Karya Infrastruktur Kewenangan Provinsi;
- ✓ SPBU Khusus Untuk Petani dan Nelayan dan SPBU Mobile Untuk wilayah kepulauan;
- ✓ Pengembangan UMKM, melalui Penyediaan Modal dan Pendampingan Usaha dan Inkubasi, fasilitas KURDA melalui BPR.

8. Program BERAMAL Untuk Mandiri dan Kolaborasi

- ✓ Menciptakan 10.000 Wirausaha Muda (Star Up Milenial, Industri Kreatif);
- ✓ **Hilirisasi SubSektor Pangan dan Hortikultural, Perkebunan, Peternakan, Kelautan, Perikanan dan Kehutanan;**
- ✓ Pariwisata Alam dan Kebudayaan;
- ✓ Petani Milenial;
- ✓ Bantuan Modal Usaha BUMDesa;
- ✓ BUMD Sehat dan Profesional;
- ✓ **KURDA** (Kredit Usaha Rakyat Daerah);
- ✓ Youthpreneur, Santripreneur, dan Pemberdayaan Ekonomi Pemuda Gereja, Hindu Darma dan Budha;
- ✓ Meningkatkan Konektivitas dan Kerjasama antar Daerah dan Pembangunan berbasis Kawasan di Selat Makassar, Teluk Tomini, Teluk Tolo-Perairan Halmahera dan Pegunungan Tengah Sulawesi.

9. Program BERAMAL Untuk Infrastruktur Publik

- ✓ Percepatan, Peningkatan dan Pemerataan Pembangunan Jalan dan Jembatan Kewenangan Provinsi;
- ✓ Percepatan, Peningkatan dan Pemerataan Pembangunan jaringan Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Provinsi : DI Bella (Banggai), DI Maoti (Parigi Moutong), DI Dongin (Banggai), DI Kolondom (Tolitoli), DI Mepanga (Parigi Moutong), DI Kasimbar (Parigi Moutong, beririsan dengan Program Beramal untuk Padat Karya Jalan Provinsi Tambu-Kasimbar), DI Ongka (Parigi Moutong), DI Bunta (Banggai);
- ✓ Padat Karya Pemeliharaan Jalan Provinsi : (29.924 + 46.156 = 76.080 KK) (Ruas : Biromaru – Poso Pesisir Selatan, Ruas : Palu Kulawi – Pipikoro – Batas Luwu Utara, Marawola – Dolo Barat – Dolo Selatan,) Doanggala – Parigi Moutong : Tambu – Kasimbar, Mepafnga – Baolan, Buol : Ruas Kali, Kab Tojo Una Una – Morut : Ruas

- Tayawa – Kolonedale ; Touna – Banggai : ruas Longge – Balingara – Uwemea – Toili Barat, Bankep : Semua Ruas, Balut : Banggai – Banggai Tengah. Tojo Una Una : lingkaran Touna dan Togeana. Morowali Utara: Nuha – Tuwuti, beririsan dengan Daerah Irigasi;
- ✓ Penyediaan Prasarana (meteran) Listrik bagi 35.000 RT;
 - ✓ Mendorong percepatan : penuntasan blankspot area (686 Desa);
 - ✓ Memfasilitasi penyediaan sarana Listrik di wilayah 3T dan Kepulauan Perbatasan.

10. **BERAMAL Untuk Sulteng Tangguh dan Berkelanjutan**

- ✓ Meningkatkan Ketangguhan Masyarakat dari bencana alam dan Perubahan Iklim;
- ✓ Meningkatkan Perlindungan Ekosistem dan Keragaman Hayati;
- ✓ Menyelenggarakan mekanisme TAPE (Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi);
- ✓ Mendorong Ekonomi Hijau, Ekonomi Sirkuler dan Low Carbon Development;
- ✓ Perbankan Hijau;
- ✓ Perlindungan Kawasan Preservasi, yaitu Kawasan bernilai konservasi tinggi di luar Kawasan konservasi (Karts, Mangrove, Ecoregion leher Sulawesi, Pulau-pulau kecil, habitat endemik);
- ✓ Adaptasi, Mitigasi dan Antisipasi Perubahan Iklim;
- ✓ Meningkatkan Indeks Ketangguhan Kabupaten;
- ✓ Meningkatkan Kapasitas Masyarakat Terhadap Potensi Dampak Bencana Geologi dan Iklim, termasuk bencana Alam dan Non Alam.

Sepuluh Agenda Aksi **BERAMAL** tersebut menyoal pada **Empat Sasaran Inklusif BERAMAL** yakni (Tematik, Spasial, Tepat Mutu, Tepat Waktu-Administratif) dan sesuai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Program, Kegiatan maupun sub kegiatan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagai acuan dalam Perencanaan, implementasi dan evaluasi Pembangunan, serta mengedepankan kerja kolaboratif dalam makna transformasi *Sulteng Uncorporated* menjadi *Sulteng Incorporated*. Sepuluh Program Aksi yang terukur beradasarkan indikator *outcome* dan *output* merupakan satu kesatuan makna solutif dalam kata:

“SULAWESI TENGAH TEMATIK-SPASIAL MENJADI INSAN BERAMAL”.